

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Dzikri Fajar Pratama¹, Yuwanto², Puji Astuti³

¹ *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

² *Departemen Politik Dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

³ *Departemen Politik Dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik merupakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang mengatur secara teknis pelaksanaan program kampung tematik di Kota Semarang. Implementasi tersebut dilakukan secara wajib di seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang, termasuk yang dilakukan pada Kecamatan Gajahmungkur. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, lingkungan, dan penguatan potensi lokal daerah-daerah melalui program pemberdayaan kampung tematik. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi kampung tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menjabarkan permasalahan menggunakan adopsi teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III.

Temuan data lapangan menunjukkan pelaksanaan kebijakan tersebut hanya berjalan secara optimal di tiga (3) wilayah dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan lima (5) dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur tidak menjalankan implementasi kampung tematik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat berupa kegagalan kejelasan komunikasi dan minimnya ketersediaan sumber daya. Terdapat juga faktor disposisi yang disadari oleh pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang baik menjadi dukungan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur tidak berjalan sebagai mestinya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perwalkot No. 22 Tahun 2018, Kampung Tematik, dan Kecamatan Gajahmungkur

ABSTRACT

Semarang Mayor Regulation Number 22 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Thematic Villages is a policy of the Semarang City Government that technically regulates the implementation of thematic village programs in Semarang City. The implementation is carried out mandatory in all sub-districts in Semarang City, including those carried out in Gajahmungkur District. The implementation of the policy is carried out to overcome economic, environmental problems, and strengthen the local potential of regions through thematic village empowerment programs. In line with this, this study discusses and analyzes the implementation of thematic villages in Gajahmungkur District in 2023. This study uses a qualitative method that describes the problem using the adoption of the theory of Policy Implementation by George C. Edward III.

Field data findings show that the implementation of the policy is only running optimally in three (3) areas out of eight (8) areas in Gajahmungkur District. Meanwhile, five (5) out of eight (8) areas in Gajahmungkur District did not carry out the implementation of thematic villages as they should. This is due to inhibiting factors in the form of failure of communication clarity and lack of resource availability. There are also disposition factors that are realized by policy implementers and a good bureaucratic structure is a support in the implementation of this policy. The results of this study show that the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 22 of 2018 in Gajahmungkur District is not running as it should.

Keywords: Policy Implementation, Perwalkot No. 22 of 2018, Thematic Village, and Gajahmungkur District

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan keberadaan penduduk Kota Semarang mencapai pada angka 1,7 juta jiwa. Jumlah tersebut menyebabkan Kota Semarang tahun 2023 dikategorikan ke dalam kota dengan kepadatan penduduk yang sangat padat oleh KPUPR.¹ Kondisi yang demikian, menjadi

awal permulaan dari segala permasalahan kesmiskinan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang.

Tabel 1.1 Kemiskinan dan Ketimpangan Kota Semarang dari Tahun 2021- 2023

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Rp522.691	Rp543.929	Rp589.598
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	79.58	84.45	79.87
Persentase	4.34	4.56	4.25
Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.68	0.67	0.56
Index Keparahan Kemiskinan (P2)	0.16	0.14	0.11

Sumber:
semarangkota.bps.go.id/indicator/23/98/1/indikator-kemiskinan.html

¹ Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat Kegiatan IBM Direktorat PKP. (2022). Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh.

Laporan Penelitian. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Persentase kemiskinan di Kota Semarang dapat dinyatakan dengan fluktuatif dari tahun 2021- 2023. Meski pada tahun 2021-2022, Pemerintah Kota Semarang mampu menekan kemiskinan dalam beberapa poin, akan tetapi angka tersebut kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023.

Permasalahan tersebut menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kota Semarang. Pemkot Semarang mencoba menghadirkan salah satu alternatif kebijakan yang mampu memberikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kota Semarang. Salah satunya melalui Kampung Tematik yang telah di inisiasi pada tahun 2018 dengan kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Kebijakan kampung tematik didasari atas permasalahan penduduk yang fokus utamanya ditunjukkan untuk menangani kawasan kumuh dan kemiskinan serta menanggulangi secara besar permasalahan kepadatan penduduk di wilayah-wilayah kelurahan di Kota Semarang.

Total jumlah kampung tematik yang telah dicanangkan oleh Pemkot Semarang dari tahun 2017-2022 berjumlah 260 kampung tematik tersebut. Keberadaan Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung

Tematik mampu sesuai tujuan dari awalnya dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kota Semarang seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kondisi lingkungan.

Hal ini juga meliputi implementasi yang terjadi di Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Sebagai satuan pemerintah di bawah Pemkot Semarang. Implementasi kebijakan Kampung tematik juga terjadi di Kecamatan di Gajahmungkur.

Tabel 1.3 Kampung Tematik yang Berada di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur 2017-2022

KECAMATAN	KELURAHAN	TEMA KAMPUNG
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampung Kamsoli
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampung Angkringan
Gajahmungkur	Bendan Dhuwur	Kampoeng Pahlawan
Gajahmungkur	Bendan Ngisor	Kampung Ramah Lansia
Gajahmungkur	Bendan Ngisor	Kampung Kreatif Kopwan Sri Rejeki
Gajahmungkur	Bendungan	Kampung Batik
Gajahmungkur	Gajahmungkur	Kampung Jajan Pasar
Gajahmungkur	Karangrejo	Kampung Jahit
Gajahmungkur	Karangrejo	Kampung Gamelan
Gajahmungkur	Lempongsari	Kampung Beliksari
Gajahmungkur	Petompon	Kampung Jamu
Gajahmungkur	Sampang	Kampung Olahan Tempe
Gajahmungkur	Sampang	Kampung Krida Kamulyan

Sumber:

<https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/datakam-pungtematik>

Kampung Tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur sebagian besar hanya terlaksana dengan terbatas dikarenakan minimnya potensi daerah yang bisa dikembangkan. Hal ini menyebabkan banyaknya kampung tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur menjadi tidak

optimal. Kampung-kampung tematik itu hanya memajang papan nama saja, tetapi tidak satu pun dijumpai aktivitas seperti yang diharapkan dengan implementasi kampung tematik Kota Semarang.

Keberadaan implementasi kampung tematik dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki ketertarikan tersendiri di Kecamatan Gajahmungkur. Terdapat kampung tematik dengan segala keberhasilannya dan terdapat juga kampung tematik dengan minim pelaksanaannya. Hal ini tidak sesuai dengan konsepsi dan daya tawar seperti yang dinyatakan dalam Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018. Oleh karenanya dengan permasalahan tersebut memunculkan sebuah ide dan gagasan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang”.

Penelitian ini akan memfokuskan prosesi kebijakan publik pada kajian implementasi kebijakan publik. Kaitannya dalam penelitian ini, kemudian keberhasilan serta permasalahan dari implementasi Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur dengan landasan Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 akan di analisis dan dibahas tentang faktor-faktor (yang mempengaruhi) secara detail dan

mendalam dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III yang menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang menjawab suatu rumusan masalah dengan memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

PEMBAHASAN

Pembahasan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Kota Semarang di Kecamatan Gajahmungkur akan berfokus dalam dua subbab. Subbab pertama akan membahas implementasi kebijakan Kampung Tematik di Gajahmungkur dan Subbab kedua akan membahas faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut terhadap tujuan kampung tematik yang tertuang dalam Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018.

Implementasi Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur

Implementasi kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur yang didasari

oleh Perwalkot Semarang Nomor 22 Tahun 2018 mengalami hal yang pasang-surut. Secara garis besar melalui hasil wawancara dan temuan data lapangan pada sudut pandang kecamatan dan kelurahan, memang terdapat proses dan upaya untuk melaksanakannya. Tetapi dalam proses pelaksanaan implementasi tersebut tidak serta merta menghasilkan proses yang ideal sebagai sebuah pelaksanaan kebijakan. Setidaknya terdapat berbagai hal, upaya, dan proses yang saling mempengaruhi dalam hal tersebut.

1. Komunikasi dalam Implementasi Kampung Tematik

a. Pendekatan untuk Mencapai Transmisi

Proses untuk mencapai transmisi dalam komunikasi kebijakan kampung tematik dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak. Transmisi yang dilakukan oleh Kecamatan Gajahmungkur dalam pelaksanaan Program Kampung Tematik dilakukan dengan bentuk rapat pasalnya keberadaan program ini tidak semua kelurahan mampu terlibat. Hanya beberapa wilayah kelurahan saja yang mampu melaksanakan program ini. Hal ini menguatkan pernyataan pertama tentang adanya pendekatan sebagai pra-komunikasi. Pendekatan pra-komunikasi dalam pelaksanaan Kampung Tematik dilakukan pada awal tahun untuk menyeleksi kelurahan

mana saja yang ingin mengajukan program kampung tematik di wilayahnya.

Pelaksanaan transmisi komunikasi tidak dilakukan dengan sering oleh pihak kecamatan. Komunikasi antara kelurahan dan kecamatan memang terjalin dengan baik. Akan tetapi intensitas yang terjadi tidak begitu sering sehingga pemantauan yang dilakukan tidak begitu detail. Pihak kelurahan juga telah memberikan maklum atas hal tersebut karena setidaknya terdapat kampung tematik dengan berbagai tema yang ada di Kecamatan Gajahmungkur, sehingga komunikasi tidak difokuskan pada satu tempat saja.

b. Pendampingan dan Dorongan sebagai Konsistensi Komunikasi

Pendampingan dan dorongan dilakukan Pihak Kecamatan Gajahmungkur dan Kelurahan yang melaksanakan kebijakan Kampung Tematik. Pendampingan ini dilakukan dengan fokus untuk mencapai keberlangsungan komunikasi antara kecamatan, kelurahan, dan pengelola kampung tematik yang terlibat dalam satu bagian kebijakan. Proses konsistensi pada komunikasi implementasi kebijakan kampung tematik di Gajahmungkur dilakukan dengan serius oleh pihak pemerintah.

Upaya yang intens dilakukan oleh pihak Kecamatan sebagai bentuk dorongan

kepada wilayah-wilayah yang program kampung tematiknya tidak berjalan. Banyaknya kampung tematik yang berjalan hanya pada awal-awal saja mendorong pihak kecamatan dan pihak terkait untuk memutar balik ide dengan mencari agenda atau *event-event* agar kampung tematik tetap berjalan dan tidak mati di Kec. Gajahmungkur.

Pendekatan tersebut konsisten dilakukan ketika ada kegiatan dalam kampung tematik ataupun tidak. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dari Kel. Gajahmungkur untuk memberikan upaya dalam pelaksanaan kampung tematik dalam setiap kegiatan di Kel. Gajahmungkur yang menjadi koridor tugas Kec. Gajahmungkur.

c. Kejelasan Komunikasi

Koordinasi yang dibentuk antara kecamatan setelah melampaui transmisi dan konsistensi, juga harus mencapai kejelasan kampung tematik itu seperti apa. Terlebih pembentukan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan harus memahami serta dipahami pengguna kebijakan (Kec. Gajahmungkur).

Namun, temuan data lapangan menyatakan kejelasan ini belum dijumpai dalam pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur karena keberadaan pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur di lapangan layaknya

sebagai program yang tidak berkelanjutan atau hanya terjadi saat tertentu saja.

Tujuan pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur dibatasi oleh nilai-nilai ekonomis saja. Mereka tidak mampu mengembangkan ide-ide dari gagasan kampung tematik untuk menciptakan kondisi kampung yang baik dan peningkatan potensi lokal.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Kampung Tematik

a. Sumber Daya Manusia yang Terlibat

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kampung tematik adalah berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kampung tematik di wilayah kecamatan dan perangkat yang ada di bawahnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam hal ini terbagi atas sumber daya manusia terpusat dan sumber daya manusia lokal. Keberadaan kedua bagian tugas tersebut di dasari atas peran masing-masing dalam implementasi Kampung Tematik di Gajahmungkur.

Sumber daya terpusat, terdiri dari sumber daya manusia di Kecamatan Gajahmungkur. Secara terpusat penanggung jawab dari implementasi kebijakan Kampung Tematik di Gajahmungkur diemban oleh Camat Gajahmungkur yang dibantu oleh Kasi Pembangunan dan pihak jajaran Kelurahan. Sedangkan sumber daya

manusia lokal dalam implementasi kebijakan ini terdiri dari pihak kelurahan dengan pengelola dari kampung tematik.

Lebih dalamnya, keberadaan peranan warga secara khusus dalam teknis kampung tematik di Kec. Gajahmungkur dilakukan secara bergotong royong satu sama lain. Peran-peran tersebut dikelola berdasarkan memanfaatkan kompetensi lokal yang ada. Peran-peran dari masyarakat dalam pelaksanaan kampung tematik di Kelurahan Gajahmungkur memberikan dampak keberdayaan warga. Hal ini merupakan bagian dampak dari peranan warga yang saling melengkapi sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan implementasi kampung tematik di Kel. Gajahmungkur.

Pihak swasta turut memberikan peranannya sebagai aktor yang terlibat program kampung tematik. Keterlibatan tersebut dinilai sebagai sumber donatur atau investor bagi sumber daya anggaran dalam implementasi kampung tematik. Selain itu, dengan keberadaan swasta, juga menimbulkan timbal balik yang terjadi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

b. Pengupayaan sumber daya fasilitas yang disediakan berbagai pihak dalam implementasi pelaksanaan kampung tematik

Sumber daya yang dipenuhi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya fasilitas sebagai penunjang sarana dan prasarana untuk mencapai kebijakan. Fokus utama penyediaan sumber daya fasilitas program kampung tematik di wilayah Kecamatan Gajahmungkur difokuskan dengan pembangunan fasilitas fisik

Penyediaan sumber daya fasilitas dalam implementasi kampung tematik di Gajahmungkur masih bergantung pada sumber daya anggaran yang ada pada pemerintah. Penyediaan sumber daya anggaran tersebut sangat minim untuk dikembangkan dalam pemanfaatan dan perawatan sumber daya fasilitas kampung tematik Kec. Gajahmungkur.

Hal tersebut menyebabkan proses pemanfaatan dan perawatan dari kampung tematik tidak berjalan dengan baik dikarenakan siklus dari transaksi dalam program kampung tematik tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh siklus perputaran dengan pemasukan yang minim tidak sebanding jika dilakukan pengeluaran untuk perawatan kampung tematik.

c. Ketersediaan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan implementasi kampung tematik

Pemerintah Kota Semarang setiap tahunnya memberikan dukungan anggaran kepada seluruh kecamatan yang ingin mengajukan program kampung tematik di wilayahnya. Anggaran program kampung tematik ini secara khusus ada berada di luar anggaran yang telah ditetapkan dalam Musrenbang di setiap kecamatan.

Sumber daya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan kampung tematik tersedia pada awal pendirian dan pembentukan kampung tematik. Adanya anggaran didasari dengan proposal yang diajukan dan terbatas pada nominal Rp. 200.000.000,-. Dengan demikian anggaran yang ada kemudian dimanfaatkan oleh Kelurahan Gajahmungkur sebagai dana operasional dan dana pembangunan fasilitas fisik untuk menunjang kampung tematik.

Nominal sumber daya anggaran Rp. 200.000.000,- merupakan anggaran yang minim bagi pelaksanaan kampung tematik dalam hal ini Kecamatan Gajahmungkur dan kelurahan Gajahmungkur. Setidaknya, dibutuhkan nominal yang lebih untuk melaksanakan program kampung tematik yang ideal di Kec. Gajahmungkur.

3. Disposisi yang Membangun Implementasi Kampung Tematik

a. Nilai-nilai yang dibentuk sebagai dampak dari komitmen implementasi dan memelihara kampung tematik

Nilai-nilai yang dibentuk dari pelaksanaan implementasi Kebijakan Kampung Tematik di Kec. Gajahmungkur tidak lepas dari apa yang tertuang dalam tujuan kampung tematik di Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang. Nilai-nilai tersebut dipahami sebagai bentuk penguatan dan kesadaran menghadapi kesenjangan ekonomi, lingkungan pemukiman yang kumuh, dan peningkatan potensi lokal dari wilayah.

Nilai-nilai yang mampu diambil dalam pelaksanaan kampung tematik dikembangkan untuk peningkatan perekonomian, pembenahan lingkungan, dan peningkatan nilai lokal. Hal yang terjadi pada Kel. Gajahmungkur selain untuk menyadarkan akan nilai dan tujuan pelaksanaan kampung tematik juga disadari sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah lokal (Kel. Gajahmungkur) nilai partisipasi masyarakat (Warga Gajahmungkur) dalam kegiatan pemerintahan.

Lebih dalamnya, adanya partisipasi yang baik dimasyarakat yang diiringi dengan peningkatan dari nilai menghadapi kesenjangan ekonomi pada pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur dapat disadari oleh pihak pemerintah. Partisipasi yang bagus dari berbagai pihak terutama oleh warga, mereka sadar hal tersebut juga diiringi dengan keberdayaan ekonomi.

Selanjutnya, pada penataan wilayah kumuh dikuatkan dengan nilai pembangunan fisik. Hal ini menyangkut pada ketersediaan sumber daya fasilitas yang ada. Pembangunan fisik kampung tematik di Kec. Gajahmungkur memberikan nuansa penataan kampung yang sebelumnya tidak baik menjadi baik.

Terakhir, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur dapat dinilai dari kesadaran akan pemahaman dari nilai potensi lokal. Hal ini menjadi kunci pelaksanaan implementasi Perwalkot Semarang No. 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik yang mengedepankan potensi lokal yang mampu diangkat menjadi nilai-nilai yang berharga. Peningkatan potensi lokal menjadi hal yang lain daripada yang lain dalam pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur. Potensi wilayah di Kec.

Gajahmungkur memiliki keragaman, yang kemudian mengerucut pada potensi ekonomi lokal dan potensi keahlian manusia.

b. Penghargaan dan konsekuensi dari Implementasi Kampung Tematik di Gajahmungkur

Pelaksanaan kebijakan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur, meski memiliki nilai yang baik akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang terhadap apresiasi dan konsekuensi. Hal tersebut terjadi karena kampung tematik dijalankan secara biasa-biasa saja oleh pelaksana kebijakan (Kecamatan dan Kelurahan di Gajahmungkur).

Keberlangsungan implementasi kampung tematik apabila terdapat keberhasilan memang mendapatkan prestasi. Prestasi tersebut dalam bentuk ucapan sebagai simbol terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan dalam keberlangsungan pelaksanaan kampung tematik.

Sedangkan apabila kampung tematik tidak berjalan, tidak dijumpai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut. Tidak ada konsekuensi yang mengikat ketika kampung tematik tidak berjalan. Kondisi demikian, melalui pihak kecamatan hanya memberikan motivasi tanpa memberikan dorongan anggaran. Kampung tematik yang tidak berjalan akan sia-sia apabila diberi

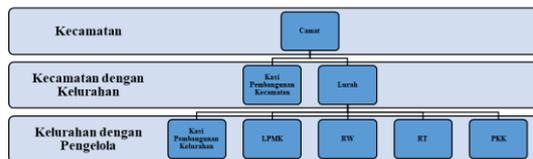
tambahan anggaran untuk beroperasi. Terlebih hal tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Struktur Birokrasi yang disediakan dalam implementasi kampung tematik

Struktur birokrasi pada implementasi kampung tematik di Kec. Gajahmungkur telah disediakan dan tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kota Semarang. Struktur birokrasi yang tersedia pada umumnya hal yang sama pada setiap kampung tematik di Kota Semarang.

Gambaran Struktur birokrasi yang ada pada Kecamatan di Kec. Gajahmungkur dapat disajikan sebagai berikut;

Bagan 3.1 Struktur Birokrasi Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur



Sumber: Perwalkot No. 22 tahun 2018 dan Dok. Kec. Gajahmungkur yang diolah

Struktur birokrasi yang sederhana akan memudahkan setiap peran memahami tugasnya dalam melaksanakan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur.

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kampung tematik

Pelaksanaan implementasi kampung tematik di Kec. Gajahmungkur tidak serta merta menjadi sebuah

implementasi yang ideal. Melalui data yang diperoleh dan pembahasan dari subbab sebelumnya, hanya terdapat beberapa kelurahan saja yang masih menjalankan.

Tiga (3) dari delapan (8) kampung tematik di Kec. Gajahmungkur berjalan secara aktif hingga tahun 2024. Sedangkan lima (5) di antaranya sudah tidak berjalan. Kondisi yang sedemikian rupa setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat dianalisis pada sub-subbab selanjutnya.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi dari kampung tematik di Gajahmungkur dapat dilihat melalui keaktifan yang dilakukan di Kampung Tematik di Kec. Gajahmungkur. Pertama, Kampung Tematik Jajan Pasar di RW. IX Kelurahan Gajahmungkur dapat dinyatakan berjalan dan aktif. Hal ini dianalisis dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan aktivitas pengurus kampung tematik. Dijumpai fasilitas fisik yang masih beroperasi, kegiatan produksi baik secara eventual atau harian yang berjalan, dan terdapat agenda pengurus.

Kedua, Kampung Tematik Beliksari RW. IV Kelurahan Lemponsari berjalan setiap minggunya. Kampung Beliksari mengangkat pembenahan fasilitas

lingkungan sumber mata air di RW.IV, selain itu pihak pengelola juga menambahkan unit kegiatannya dengan pengolahan limbah rumah tangga untuk dijadikan kerajinan. Agenda Kampung Tematik Beliksari hanya berjalan setiap 40 hari sekali dengan adanya kegiatan jual beli UMKM sekitar atau festival kesenian.

Ketiga, Kampung Tematik Pancasila di wilayah RW III Kelurahan Bendungan berjalan baik hingga tahun 2023. Sama halnya dengan Kampung Beliksari, keberadaan Kampung Pancasila mengutamakan pada pembangunan fisik yang dipusatkan dengan adanya Pura Agung Giri Natha. Selain itu keberadaan kepengurusan dipusatkan pada Pengurus RW. III Kel. Bendungan.

Berdasarkan hasil penjelasan hasil temuan lapangan, setidaknya faktor disposisi dan struktur birokrasi mampu memberikan dukungan besar bagi implementasi kampung tematik di Kec. Gajahmungkur. Kedua faktor tersebut kemudian dapat dikembangkan dalam penjelasan sebagai berikut;

Faktor pendukung pertama adalah adanya nilai disposisi kesadaran sumber daya manusia untuk melakukan operasional kampung tematik dan perawatan terhadap sumber daya fasilitas. Faktor pendukung kedua adalah adanya disposisi sebagai

kebermanfaatan yang dapat diterima dari pengguna. Faktor pendukung terakhir adalah adanya struktur birokrasi yang mendukung keberlanjutan.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi dari kampung tematik di Gajahmungkur dapat dilihat melalui tidak berjalannya implementasi ini di Kampung Tematik di Kec. Gajahmungkur. Faktor-faktor penghambat tersebut terbagi dan dikembangkan dalam proses pelaksanaan kampung tematik di kelurahan-kelurahan tersebut.

Pertama, Kampung Tematik Ramah Lansia di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor tidak berjalan dalam implementasi kampung tematik. Hingga tahun 2023 tidak dijumpai aktivitas lansia yang lebih spesifik di wilayah Kampung Tematik tersebut. Hanya dijumpai fasilitas sebagai penanda identitas dan fasilitas kebun. Tidak ada upaya dari kelurahan untuk menghidupkan kembali dan tidak ada upaya dari masyarakat untuk melanjutkan kegiatan kampung tematik.

Kedua, Kampung Tematik Kamsoli “Kampung Ndeso Pinggir Kali” mengangkat tema ekonomi produksi ikan Bandeng Presto dari ekonomi lokal. Pada tahun 2023, anggaran difokuskan pada pengembangan fisik tidak pada

pengembangan potensi ekonomi. Fasilitas fisik tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan produksi.

Ketiga, Kampung Tematik olahan Tempe di RW.I Kelurahan Sampangan mengangkat tema ekonomi, kondisi tahun 2023 kegiatan kampung tematik tidak berjalan. Hal ini dipengaruhi minimnya sumber daya manusia pengurus karena faktor pengurus merupakan pengusaha olahan tempe yang aktif. Minimnya sumber daya fasilitas, hal ini dibuktikan hanya ada fasilitas papan identitas saja tanpa adanya fasilitas bersama untuk pengembangan tempe.

Keempat, Kampung Gamelan di wilayah RW. IV Kelurahan Karangrejo tidak berjalan pasca didirikan hingga saat ini. Pelaksanaan Kampung tematik ini sejak awal sudah salah perencanaan. Harapan dari pengelola dan kelurahan hanya berfokus pada segi historis seorang dalang sehingga diusunglah kampung tematik gamelan. Namun keberlanjutannya tidak dapat dijalankan secara baik.

Kelima, Kampung Tematik Jamu di wilayah RW. V Kelurahan Petompon tidak berjalan kembali. Keberadaan kampung jamu pada awal pendirian hingga tahun 2022 disambut dengan baik oleh warga. Hal itu

mengubah kondisi lingkungan RW. V Kel. Petompon menjadi lebih asri.

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil temuan lapangan tersebut, secara garis besar faktor sumber daya dan komunikasi memberikan pengaruh besar terhadap hambatan yang terjadi pada implementasi kampung tematik di Kec. Gajahmungkur. Faktor penghambat pertama adalah minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan. Hal ini dapat ditunjukkan pada kelima kampung tematik yang sudah tidak aktif. Faktor yang kedua adalah minimnya sumber daya fasilitas terhadap pelaksanaan kampung tematik dan ditunjukkan hanya bersifat simbolik, tidak ada kebermanfaatan yang dapat menunjang dampak yang lebih jauh selain sebagai sebuah identitas dalam implementasi kampung tematik di kampung tematik tersebut.

Faktor yang ketiga adalah faktor kesalahan komunikasi dalam perencanaan dan analisis potensi wilayah. Hal ini terjadi secara nyata di Kampung Gamelan di Kel. Karangrejo yang dimana nilai historis yang diangkat dan direncanakan pada kampung tersebut hanya bermanfaat sesaat dan pada kalangan tertentu saja. Faktor yang keempat adalah faktor tidak ada upaya kelurahan untuk melakukan komunikasi dalam pelaksanaan kampung tematik yang sudah

tidak berjalan. Hal ini terjadi pada seluruh kampung tematik yang tidak berjalan pada kelima kelurahan tersebut.

Faktor yang kelima adalah minimnya konsekuensi yang diberikan kecamatan kepada kelurahan atau pengurus yang tidak melaksanakan kampung tematik. Hal ini terjadi pada kelima kelurahan yang sudah tidak menjalankan kampung tematik.

Faktor penghambat pelaksanaan kampung tematik di Kec. Gajahmungkur secara aktual banyak dijumpai melalui kampung tematik yang sudah tidak berjalan dibandingkan yang berjalan secara baik. Kondisi ini dipengaruhi dengan sumber daya manusia yang minim untuk mengelola, sumber daya fasilitas umum yang tidak dibangun untuk menunjang pemberdayaan bersama, dan anggaran yang minim. Pelaksanaan Kampung Tematik di beberapa kelurahan hanya bersifat simbolik pada awal peresmian dan tidak diselingi keberlanjutan yang baik.

Selain itu, dalam satu kasus di kelurahan, kampung tematik direncanakan asal-asalan dan implementasinya tidak berjalan. Hal ini menjadi tidak optimalnya implementasi kampung tematik di wilayah kelurahan masing-masing. Pemerintah kelurahan dan kecamatan tidak menyadari potensi yang harus dikembangkan, selain itu kehadiran pemerintah sebagai fasilitator

serta kontrol dalam implementasi kampung tematik di Kec. Gajahmungkur tidak dirasakan.

PENUTUP

SIMPULAN

Implementasi Kampung Tematik

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik telah diimplementasikan melalui delapan (8) kampung tematik yang tersebar di Kecamatan Gajahmungkur. Keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti hanya tiga (3) dari delapan (8) kampung tematik yang berjalan, di antaranya; di Kampung Tematik Jajan Pasar, Kampung Tematik Beliksari, dan Kampung Tematik Pancasila serta lima (5) dari delapan (8), di antaranya di; Kampung Tematik Ramah Lansia, Kampung Tematik Kamsoli “Kampung Ndeso Pinggir Kali”, Kampung Olah Tempe, Kampung Gamelan, dan Kampung Jamu yang sudah tidak berjalan sesuai dengan Perwalkot tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi kebijakan kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut terdiri didukung atas berjalannya disposisi dan

struktur birokrasi yang ada kampung tematik. Melalui disposisi dan struktur birokrasi, implementasi kampung tematik di Gajahmungkur dapat memunculkan kesadaran SDM, kebermanfaatannya yang diterima pengguna, dan keberlanjutan pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan faktor komunikasi. Melalui hambatan yang terjadi pada komunikasi dan sumber daya, hambatan implementasi kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan, minimnya sumber daya fasilitas yang memadai, faktor kesalahan komunikasi dalam perencanaan dan analisis potensi wilayah, tidak adanya upaya kelurahan melakukan komunikasi dalam peremajaan dan pemberian motivasi, dan minimnya konsekuensi yang diberikan dari pihak kecamatan.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah;

1. Pihak kecamatan dan kelurahan di Gajahmungkur hendaknya meningkatkan kesadaran dan keseriusan dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang

petunjuk pelaksanaan kampung tematik di Gajahmungkur.

2. Pihak kecamatan dan kelurahan di Gajahmungkur hendaknya melakukan analisis mendalam terhadap faktor penghambat implementasi kebijakan kampung tematik tersebut. Melalui analisis tersebut, kecamatan dan kelurahan mampu memperbaiki permasalahan komunikasi, sumberdaya, dan disposisi.
3. Kecamatan dan kelurahan juga harus bertindak tegas terhadap kontrol dan pengawasan dalam implementasi kampung tematik di wilayahnya. Kontrol dan pengawasan ini akan memberikan konsekuensi besar jika implementasi kebijakan itu tidak berjalan dengan baik. Dengan hal ini, kebijakan kampung tematik akan berjalan secara keseluruhan di Kecamatan Gajahmungkur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dunn, W. N. (1981). *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice Hall.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Fishcer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics,*

- and Methods*). New York: CRC Press.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. Oxford: Martin Robertson.
- Laswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. California: Stanford University Press.
- Lexy J. Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Quinn, & Michael, P. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skripsi dan Jurnal**
- Saputri, A. Y. (2018). Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). *Jurnal Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip*.
- Schofield, J., & Sausman, C. (2004). Symposium on Implementing Public Policy: Learning from Theory and Practice: Introduction. *Public Administration*, 235.
- Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat Kegiatan IBM Direktorat PKP. (2022). Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh. *Laporan Penelitian*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Dokumen Internet**
- Pemerintah Kota Semarang. (2022). *Kampung Tematik Kota Semarang*. Dipetik 2023, dari Data Kampung Tematik: <https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/datakampungtematik>
- Pemerintah Kota Semarang. (2022). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik*: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241535/perwali-kota-semarang-no-22-tahun-2018>
- Semarang, B. K. (2023). *Indikator Kemsikinan: Badan Pusat Stastistik Kota Semarang*. Diambil kembali dari Badan Pusat Stastistik Kota Semarang: <https://semarangkota.bps.go.id/>